

MUHAMMADIYAH DAN PROBLEMA HUBUNGAN AGAMA-BUDAYA

*Biyanto**

Abstract: *This article deals with Muhammadiyah's view of the inter-connection between religion and culture. Religion is a divine product while culture is a human invention. How these two different domains are inter-related will be a kind of formidable task to expose. To do this, the paper will discuss first the possible relation between Muhammadiyah and Salafiyah as far as theology is concerned. Many have contended that Muhammadiyah is an extension of this Arabian theology. The paper will try to trace if there is any such theological relation between the two by appealing to some basic concepts that both Muhammadiyah and Salafiyah hold such as the concept of puritanism; that the Qur'an and the prophetic traditions are the sole sources for both religion and culture. But we also try to explore the unique aspect of each movement of which the other does not share. Thus, Muhammadiyah –unlike Salafiyah- has a good deal of awareness in culture and even adopts the “cultural approach” in propagating Islam. As a religious organization whose task lies mainly in calling people into Islam, Muhammadiyah has advocated what is commonly known as the “dakwah cultural”; a cultural approach in dakwah. For this purpose, Muhammadiyah has designed a guidebook on how “dakwah kultural” is carried out, its steps, and strategies. In writing his paper, we hope to shed a better light on the objective nature of Muhammadiyah and its view concerning religion and culture.*

Keywords: *religion, culture, dakwah kultural, Muhammadiyah*

Pendahuluan

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di tanah air kini telah memasuki abad kedua. Perhitungan ini tentu didasarkan pada kalender Qamariyah. Muhammadiyah didirikan KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912.¹ Salah satu tantangan yang dihadapi Muhammadiyah ketika memasuki abad kedua adalah menemukan formulasi yang tepat untuk mengurai hubungan agama dan budaya. Problem hubungan agama dan budaya ini merupakan persoalan yang telah dibicarakan Muhammadiyah dalam beberapa diskusi, seminar, dan even resmi organisasi seperti sidang Tanwir dan Mukhtamar.

Salah satu bentuk keseriusan Muhammadiyah membicarakan hubungan agama dan budaya kiranya dapat dilacak melalui perdebatan terhadap wacana strategi dan implementasi konsep dakwah kultural. Di Muhammadiyah, wacana dakwah kultural telah mulai dibicarakan sejak sidang Tanwir di Bali (2002), Makassar (2003), dan Mataram (2004). Bahkan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Malang pada 2005, dakwah kultural juga kembali dibicarakan. Tidak tertutup kemungkinan dalam Mukhtamar ke-46 di Yogyakarta pada 2010, dakwah kultural akan dibicarakan dalam konteks yang lebih operasional. Fenomena ini jelas menunjukkan betapa kuat keinginan internal Muhammadiyah untuk mengubah strategi dakwah dengan lebih mengakomodasi tradisi, budaya, dan adat-istiadat lokal. Strategi dakwah dengan menyesuaikan ragam kehidupan keagamaan sebagai proses sosial budaya itulah yang

* Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

¹Haedar Nashir, dkk, *Materi Induk Pengkaderan Muhammadiyah* (Yogyakarta: BPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1994), 124.

selanjutnya populer disebut dengan dakwah kultural.

Tentu saja, keputusan agar Muhammadiyah menggunakan strategi dakwah kultural dalam menyampaikan pesan dan ajaran agama Islam kepada masyarakat memiliki arti penting bagi perkembangan persyarikatan di masa mendatang. Sebab, sudah menjadi rahasia umum jika dakwah Muhammadiyah selama ini dirasa kurang mampu mengakomodasi adat dan budaya lokal. Bahkan acapkali materi dakwah mubaligh Muhammadiyah masih didominasi tema menghantam budaya lokal karena dianggap berbau *Takhayul*, *Bid'ah*, dan *Churafat* (TBC).

Persoalannya, apakah dengan menggunakan strategi dakwah kultural berarti Muhammadiyah akan memberikan justifikasi terhadap budaya lokal yang selama ini dianggap bertentangan dengan al-Qur'an dan Hādīth. Ataukah Muhammadiyah hanya ingin memberikan warna keislaman (islamisasi) terhadap budaya lokal tersebut. Selanjutnya, bagaimana peluang dakwah kultural Muhammadiyah? Apakah memang tidak ada resistensi di kalangan Muhammadiyah, khususnya tokoh-tokoh yang selama ini sangat menekankan semangat purifikasi? Beberapa pertanyaan tersebut sengaja diajukan untuk menguraikan kreasi Muhammadiyah dalam menghadapi problem hubungan agama dan budaya lokal.

Beberapa Kritik terhadap Muhammadiyah

Pandangan minor biasanya dikemukakan sebagian orang tatkala membicarakan kiprah Muhammadiyah dalam mengapresiasi budaya. Misalnya, Kuntowijoyo pernah mengingatkan agar warga Muhammadiyah tidak memiliki kecenderungan anti budaya. Sebab, credo Muhammadiyah untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah (*al-ruju>ila>al-Qur'an wa al-Sunnah*) dan sikap kehati-hatiannya selama ini terdengar seperti gerakan anti kebudayaan.² Apalagi dalam realitasnya Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah yang sangat anti terhadap budaya agama yang populer dikenal dengan "Tasinta" (*tahlilan*, *yasinan*, dan *istighasah*).

Pernyataan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan anti kebudayaan memang tidak cukup hanya dengan melihat apresiasinya terhadap budaya populer. Sebab, menurut definisi yang dikemukakan Taylor, kebudayaan secara umum adalah sebagai keseluruhan kompleksitas yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, nilai-nilai moral, hukum, tradisi-tradisi sosial, serta seluruh kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat (*culture or civilization taken in its with ethno graphic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*).³ Pengertian ini jelas menggambarkan betapa luas cakupan kebudayaan. Karena itu sangat tidak tepat jika dikatakan Muhammadiyah adalah gerakan anti kebudayaan. Kuntowijoyo mengistilahkan Muhammadiyah merupakan gerakan kebudayaan baru tanpa kebudayaan lama.⁴

Doktrin Muhammadiyah tentang seni dan kebudayaan juga menyatakan bahwa Islam adalah agama yang fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan

²Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (Bandung: Mizan, 2001), 158.

³Edward B. Taylor, "Culture," dalam David L. Shills (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 3 (New York: The Macmillan Company and the Free Press, 1996), 527.

⁴Kuntowijoyo, *Muslim*, 159.

fitrah manusia. Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah tersebut untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah. Seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah yang harus dipelihara sesuai dengan jiwa dan ajaran Islam. Berdasarkan kerangka pikir ini Majelis Tarjih dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 tahun 1995 menetapkan bahwa karya seni hukumnya *mubah* (boleh) selama tidak mengarah atau mengakibatkan *fasad* (kerusakan) dan *ba'id 'an al-Allah* (terjauhkan dari Allah). Warga Muhammadiyah juga dianjurkan untuk menciptakan dan menikmati seni dan budaya karena dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan. Selain itu, kesenian dan kebudayaan juga dapat dijadikan sarana mendekatkan diri pada Allah dan sebagai media berdakwah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban.⁵ Dengan demikian, pengembangan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah sangat dianjurkan selama sesuai dengan etika dan norma ajaran Islam.

Pada tataran implementasi, gerakan Muhammadiyah memang cenderung anti kebudayaan, tidak seperti yang diamanatkan oleh nilai-nilai yang ada di dalam keputusan organisasi. Studi Munir Mulkhan (lahir, 1946) terhadap masyarakat petani di Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur, menunjukkan bahwa Muhammadiyah belum memiliki konsep yang jitu dalam upaya mendorong perubahan dan kemajuan masyarakat dengan budaya populer (*popular culture*). Studi Munir Mulkhan ini menghasilkan tipologi pengikut Muhammadiyah menjadi empat varian: *Al-Ikhlās*, *Kyai Dahlan*, *Munu* (Muhammadiyah-NU), dan *Marmud* (Marhenis-Muhammadiyah). Varian *Al-Ikhlās* merupakan kelompok minoritas yang sangat puritan dan mengecam praktik TBC (*Takhayul*, *Bid'ah*, dan *Khurafat*). Meskipun sangat disegani karena kesalihannya, kelompok *Al-Ikhlās* tidak pernah mampu menduduki posisi penting di dalam keorganisasian tingkat kecamatan (cabang) dan desa (ranting).

Sementara varian *Kyai Dahlan* termasuk kelompok minoritas tetapi menguasai kepemimpinan dalam cabang dan ranting. Hal ini dikarenakan kelompok *Kyai Dahlan* sangat toleran terhadap praktik TBC meski tidak turut melakukan. Kelompok minoritas lainnya adalah *Marmud* yang tetap menjadikan TBC sebagai tradisi. Sementara kelompok mayoritas dalam pengikut Muhammadiyah di Wuluhan adalah *Munu* yang berprofesi sebagai petani dan tetap menjadikan TBC sebagai tradisi.⁶ Temuan Munir Mulkhan ini jelas menunjukkan bahwa budaya populer yang sejak lama ditentang Muhammadiyah melalui dakwah terhadap TBC ternyata masih melekat pada sebagian pengikut Muhammadiyah, terutama yang berada di wilayah pedesaan.

Dakwah Muhammadiyah juga belum menunjukkan konsep yang jelas untuk merespon perkembangan tasawuf dan tarekat. Muhammadiyah sebatas menyatakan dapat membenarkan ajaran tasawuf dan tarekat jika tidak menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah, serta masih terkait dengan akhlaq yang mulia dan *i'tiqad* yang benar. Tetapi, karena dalam tasawuf dan tarekat memiliki banyak aliran dan mazhab maka perlu dilakukan pengamatan secara seksama. Dalam hal ini Muhammadiyah berpandangan bahwa sebaiknya yang diamalkan oleh umat Islam adalah yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad, tidak kurang dan tidak ditambah-tambah.⁷ Sikap tegas ini dikemukakan karena menurut pemahaman

⁵Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* (Malang: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2001), 157-158.

⁶Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani* (Yogyakarta: Benteng, 2005), 350.

⁷Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, Jilid II (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001), 13-16.

Muhammadiyah bahwa tidak diketahui secara pasti mana aliran tasawuf dan tarekat yang sesuai dengan maksud al-Qur'an dan Sunnah.

Belajar pada Ahmad Dahlan

Pada tingkat tertentu sesungguhnya terdapat kesadaran di kalangan internal Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah memiliki hambatan ketika berinteraksi dengan berbagai budaya populer di masyarakat. Persoalan ini dapat diamati melalui keterbatasan jangkauan wilayah dakwah Muhammadiyah. Terhadap hal ini Muhammadiyah jelas membutuhkan konsep yang kreatif agar dapat lebih apresiatif terhadap budaya. Sebab, jika merujuk pada periode awal maka sesungguhnya Muhammadiyah telah menunjukkan apresiasi yang sangat baik dan tegas terhadap adat, tradisi, dan budaya lokal.

Apresiasi positif dan sikap tegas itulah yang ditunjukkan KH Ahmad Dahlan (1868-1923), pendiri Muhammadiyah. Misalnya, Ahmad Dahlan dengan sikap tegasnya telah meluruskan arah kiblat Masjid Keraton, melaksanakan *ṣalāt* dua hari raya (*'idayn*) di lapangan, dan membentuk Badan Amil Zakat yang sebelumnya menjadi hak prerogatif kyai. Sementara dalam kesempatan lain, Ahmad Dahlan juga menggunakan bahasa daerah (lokal) untuk menyampaikan khutbah agar pesannya dapat dipahami masyarakat. Padahal ketika itu masih banyak kyai yang berpandangan bahwa khutbah harus disampaikan dalam bahasa asli (Arab) sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad, meski jamaah tidak banyak yang mampu memahami isi khutbah. Maka dalam hal ini, berkhotbah dengan bahasa lokal jelas merupakan terobosan penting saat itu.⁸ Dengan melakukan semua ini berarti Ahmad Dahlan telah melakukan pembaruan pengelolaan ibadah *mahalla* dan ibadah *'am* (sosial) dengan manajemen modern.

Terobosan lain yang dilakukan Ahmad Dahlan adalah mengadopsi model pendidikan yang dikembangkan Barat (Belanda). Usaha Muhammadiyah dalam mengembangkan sistem pendidikan berkualitas berkembang pesat, jauh meninggalkan gerakan Budi Utomo. Para tokoh Budi Utomo umumnya masih ketakutan dengan pengaruh individualisme, intelektualisme, dan sekularisme dari budaya Barat. Mereka ingin tetap mempertahankan budaya Timur yang terkenal halus dan bercorak mistik untuk kemudian dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keinginan untuk mempertahankan budaya Timur inilah yang kemudian diwujudkan dalam sistem pendidikan model Taman Siswa. Sementara Muhammadiyah merasa memiliki pegangan ajaran agama yang bersumber pada al-Qur'an dan *Hādīth*. Maka tanpa keraguan sedikit pun, Muhammadiyah telah mengadopsi model pendidikan Barat agar dapat bersaing dengan lembaga pendidikan yang dikembangkan misionaris Kristen.⁹

Visi Ahmad Dahlan di bidang pendidikan juga menunjukkan komitmennya untuk memberikan akses bagi semua kelompok masyarakat. Misalnya, Ahmad Dahlan telah menyelenggarakan pendidikan khusus anak jalanan dan gelandangan yang dikenal dengan nama *Fathul Asrar Miiftahus Sa'adah* (FAMS). Munir Mulkhan memberikan analisis bahwa model pembelajaran FAMS adalah seperti yang dikembangkan Paulo Freire yaitu melalui

⁸Abdul Munir Mulkhan, "Pendidikan Bagi Semua," *Suara Muhammadiyah*, no. 16, th. 93 (16-31 Agustus 2008), 42.

⁹Simuh, "Muhammadiyah dan Pembinaan Masyarakat yang Berbudaya Madani," dalam *Muhammadiyah dalam Kritik*, ed. Maryadi dan Abdullah Aly (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), 138-139.

problematisasi dan kesadaran (*konsientas*). Dari model pembelajaran ini, anak jalanan dan gelandangan berangsur menyadari diri dan mengubah pola hidupnya.¹⁰

Kepeloporan Ahmad Dahlan juga ditunjukkan tatkala mendorong kaum perempuan untuk berkiprah agar memperoleh hak sebagaimana kaum laki-laki. Menurut Mukti Ali, usaha Ahmad Dahlan untuk membuka dan melancarkan pendidikan bagi kaum perempuan ini dapat dipandang mendahului pembaru Muslim lainnya. Sebab, pada masa itu wanita masih menjadi masalah di dunia Arab. Sementara di Indonesia posisi wanita juga masih tertinggal jauh.¹¹ Kondisi inilah yang ingin diubah oleh Ahmad Dahlan melalui usaha menghimpun kaum perempuan untuk mengikuti pengajian yang diberi nama *Sopo Trisno* (1914). Pada 22 April 1917, nama Sopo Trisno kemudian diubah menjadi 'Aisyiyah yang berstatus sebagai bagian dari Muhammadiyah yang bertugas mengurus kaum perempuan.¹²

Salah satu kepeloporan 'Aisyiyah periode awal adalah mengajarkan penggunaan kerudung bagi kaum wanita. Program ini dicanangkan pada 1919. Program ini jelas merupakan bentuk protes sosial terhadap kultur masyarakat saat itu yang mengajarkan hanya wanita berhaji yang boleh menggunakan kerudung. Ahmad Dahlan juga menganjurkan agar kaum wanita memakai kerudung yang baik. Maka, dibuatlah kerudung bersulam dengan benang yang beraneka warna dan kain berkualitas. Usaha Ahmad Dahlan ini penting dikemukakan, sebab pada saat itu berkembang pandangan di masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan itu ibarat "swargo nunut, neroko katut." Karenanya, peran sosial perempuan tidak banyak mendapat perhatian. Tegasnya, kaum perempuan ketika itu hanya mengurus persoalan yang berkaitan dengan wilayah domestik (*domestic sphere*). Sementara untuk wilayah publik (*public sphere*) dikerjakan kaum laki-laki.

Kreasi Ahmad Dahlan juga tampak tatkala membentuk Kepanduan Hizbul Wathan (HW) yang kemudian menjadi bagian dari organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah. HW yang dibentuk pada 1918 bermula dari ketertarikan Kyai terhadap kegiatan anak-anak muda di Pura Mangkunegaran. Ketika itu Kyai sedang bertabligh di Solo dan mengamati anak-anak muda tersebut berbaris rapi, bermain, dan berseragam. Kegiatan ini bernama *Javaansche Padvinderij Organisatie* (JPO), semacam pendidikan luar sekolah.

Dengan semangat melakukan pembinaan terhadap generasi muda, Kyai kemudian meminta guru-guru Muhammadiyah untuk mencontoh JPO. Dengan dipelopori Somodirjo (Mantri Guru *Standaarschool Suronatan*, kini SD Suronatan) dan Sarbini (Guru Sekolah Muhammadiyah Bausasran dan bekas militer yang pernah memperoleh pendidikan kemiliteran dari Hindia Belanda), mulai dilaksanakan kegiatan berbaris dan berolahraga yang diikuti tidak hanya guru-guru dan anak-anak Muhammadiyah, melainkan juga pemuda di Kauman dan sekitarnya.¹³ Kegiatan ini terus berkembang dan menjad daya tarik pemuda saat itu. Dalam perkembangannya kegiatan ini kemudian menjadi HW yang eksistensinya sangat melegenda dalam sejarah Persyarikatan Muhammadiyah.

¹⁰Abdul Munir Mulkhan, *Pendidikan*, 42.

¹¹A. Mukti Ali, "Amalan Kyai Haji Ahmad Dahlan," dalam *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan: Sebuah Dialog Intelektual*, ed. Sujarwanto, dkk (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 350.

¹²Mustafa Kamal Pasha dan Chusnan Yusuf, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islamiyah* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2000), 45.

¹³Syafiq A. Mughni, dkk., *Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004* (Surabaya: Hikmah Press, 2005), 296-297.

Dakwah Kultural sebagai Solusi

Mencermati ijtihad tokoh Muhammadiyah generasi awal maka pengikut organisasi ini berarti harus kembali meneguhkan semangat dakwah dan kejuangannya dengan tetap mengakomodasi budaya lokal. Untuk kepentingan ini Muhammadiyah telah membuat keputusan penting berupa gagasan dakwah kultural. Dakwah kultural dalam rumusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah diartikan sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.¹⁴

Model dakwah kultural menurut Munir Mul Khan dapat dibedakan dari dakwah struktural yang dipahami sebagai pendekatan dakwah yang berpola dari atas ke bawah (*top down approach*). Dikatakan oleh Munir Mul Khan bahwa model dakwah struktural selalu berorientasi normatif-doktriner dan bahkan terkadang menggunakan pendekatan politik kekuasaan. Larangan dan ancaman selalu didasarkan pada ketentuan aqidah, akhlaq, ibadah-fiqh guna mengubah perilaku keagamaan seseorang atau masyarakat.¹⁵ Sementara dakwah kultural memiliki ciri-ciri seperti dinamis, kreatif, dan inovatif. Ini berarti dakwah kultural menuntut juru dakwah untuk mencoba memahami ide-ide, adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktivitas, simbol, dan hal-hal fisik yang memiliki makna tertentu dan hidup subur dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian dakwah kultural tersebut diperoleh berdasarkan kajian sosiologi dan antropologi agama yang menyebutkan bahwa manusia adalah homo *religijs*, homo *festivus*, dan homo *symbolicum*. Manusia dikatakan bersifat homo *religijs* karena manusia dalam budaya apa pun memiliki kecenderungan mengaitkan segala sesuatu di dunia ini dengan kekuatan ghaib. Kepercayaan animisme, dinamisme, politeisme, dan monoteisme merupakan contoh nyata manusia sebagai makhluk yang percaya pada Tuhan. Dikatakan homo *festivus* karena manusia adalah makhluk yang paling senang mengadakan festival. Sejak zaman purba hingga era modern ini, festival tetap menjadi kultur yang digemari setiap orang. Sementara homo *symbolicum* menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan tindakannya dengan menggunakan simbol-simbol, seperti bahasa, mitos, tradisi, dan kesenian.¹⁶

Secara lebih khusus, Ernest Cassirer dalam *An Essay on Man* (1944), seperti dikemukakan Jujun S. Suriasumantri, menyatakan bahwa keunikan manusia sebenarnya bukan terletak pada kemampuannya untuk berpikir, melainkan karena kemampuannya dalam berbahasa. Manusia sebagai *animal symbolicum* memiliki makna yang lebih luas dari *homo sapiens* (makhluk yang berpikir). Ini karena dalam kegiatan berpikirnya manusia telah menggunakan simbol.¹⁷ Dengan kemampuan menggunakan bahasa manusia dapat mengembangkan kebudayaan dan meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi.

¹⁴Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dakwah Kultural Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 26. Lihat juga, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah*, No. 4 (Rajab 1424 H/ September 2003), 46.

¹⁵Abdul Munir Mul Khan, *Kesalehan Multikultural: Ber-Islam secara Autentik-Kontekstual di Aras Peradaban Global* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2005), 213.

¹⁶Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dakwah Kultural*, 27-28.

¹⁷Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 171.

Dapat dikatakan bahwa dakwah kultural merupakan wujud apresiasi dari berbagai kritik kalangan internal dan eksternal Muhammadiyah terhadap kiprah organisasi ini dalam berdakwah. Dengan kata lain, dakwah kultural merupakan pemekaran metode dakwah Muhammadiyah yang selama ini cenderung bersifat puritan (purifikasi/pemurnian). Selama ini masyarakat memiliki asumsi “miring” terhadap dakwah Muhammadiyah. Dikatakan bahwa dakwah Muhammadiyah itu cenderung mengatakan *haram*, *shirk*, *bid'ah*, *khurafat*, dan sebagainya, yang pada ujungnya melarang keras perbuatan yang masih berkaitan dengan tradisi lokal. Akibatnya, dakwah Muhammadiyah terkesan konfrontatif karena berupaya memberangus keberadaan budaya lokal.

Berbagai kritik terhadap dakwah Muhammadiyah yang dikatakan tidak toleran terhadap budaya, di antaranya dikemukakan oleh Moeslim Abdurrahman (lahir 1947). Ketika tampil menjadi pembicara dalam acara *Launching Buletin Kalimah Sawa* dan bedah buku *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal* dan *Sinergi Agama dan Budaya Lokal: Dialektika Muhammadiyah dan Seni Lokal*, pada 24 Mei 2003 di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Moeslim menyatakan;

Bagi saya, “dosa” Muhammadiyah mungkin yang harus disesali tidak hanya karena sejarahnya yang ganas dan apriori terhadap seni dan budaya lokal. Tetapi yang lebih parah kalau justru Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* ternyata menjadi *jumud* karena tidak mampu memperbarui kesadaran Islam yang lebih substansial dan terbuka untuk memaknai bahwa dakwah bukanlah identik dengan propaganda iman. Dakwah yang sesungguhnya adalah setiap kerja religius untuk peradaban dan kemanusiaan.¹⁸

Penilaian yang menyatakan Muhammadiyah anti budaya lokal juga dikemukakan Abd. Rohim Ghozali (lahir 1967). Ia menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya stigma tersebut dikarenakan dominasi mubaligh Muhammadiyah yang hanya pandai menjustifikasi (melakukan klaim kebenaran). Mereka telah menganggap budaya lokal sarat dengan TBC. Karena profil mubaligh berkarakter seperti ini menjadi arus utama (*mainstream*) di persyarikatan, maka pada gilirannya Muhammadiyah kehilangan kearifan ketika berinteraksi dengan budaya lokal.¹⁹ Karena itulah Abd. Rohim Ghozali menganggap wacana dakwah kultural sebagai gagasan yang tepat. Dakwah kultural menurutnya merupakan kontekstualisasi dari corak dakwah yang pernah dikembangkan Ahmad Dahlan. Inti dari semangat dakwah kultural adalah mengimplementasikan Islam dengan cara melihat dan mengapresiasi setiap realitas budaya secara konstruktif, obyektif, dan rasional. Dakwah Islam tidak boleh dilakukan dengan cara memusuhi, menjustifikasi, dan bahkan menolak kultur lain dengan klaim kebenaran yang subyektif.²⁰

Praktik dakwah Muhammadiyah yang bersifat anti budaya dipahami Ahmad Fuad Fanani (lahir 1979) sebagai bentuk pengingkaran terhadap dakwah yang dilakukan Ahmad Dahlan. Menurut Fuad Fanani, corak keberagamaan dan gerakan Muhammadiyah pada periode awal sesungguhnya sangat moderat. Dakwah Islam yang dilakukan Ahmad Dahlan

¹⁸Fariz, “Islam Bukan Agama Misionaris Tapi Agama Peradaban,” *Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, vol. 1, no. 1 (Juni, 2003), 21. Lihat juga, Moeslim Abdurrahman, “Berislam secara Kultural,” dalam *Muhammadiyah sebagai Tenda Kultural*, ed. Moeslim Abdurrahman (Jakarta: Ideo Press dan Maarif Institute, 2003), xv-xvi.

¹⁹Abd. Rohim Ghozali, “Dari Dogmatisme ke Kultural,” dalam Moeslim Abdurrahman (ed), *Muhammadiyah sebagai*, 13.

²⁰Ibid., 14.

pada periode awal Muhammadiyah juga bercorak kultural.²¹ Hal ini tampak melalui terobosan Ahmad Dahlan dalam melakukan *tajdid* dan pembelaan rakyat miskin melalui aksi sosial yang konkrit. Bahkan terhadap orang abangan dan di luar Islam pun Ahmad Dahlan dengan terbuka bergaul dan tolong-menolong dalam perjuangan. Tetapi, dalam perkembangannya Muhammadiyah kemudian berubah menjadi gerakan yang kurang menunjukkan senyum dan wajah persahabatan terhadap kebudayaan. Padahal, corak keberagaman seseorang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sosial dan budayanya. Lebih jauh, Fuad Fanani memberikan apresiasi terhadap wacana dakwah kultural dengan menyatakan;

Dakwah kultural bukan sekedar mengakomodasi budaya lokal dan bukan merupakan langkah mundur Muhammadiyah. Dakwah kultural adalah dakwah model Rasulullah Saw yang menghargai keragaman suku dan kebudayaan, serta pengakuan terhadap berbagai model keberagaman seseorang untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat alam semesta. Dakwah kultural adalah dakwah kemanusiaan yang bertujuan membebaskan manusia dari ketertindasan, ketidakadilan, kemunafikan, dan hegemoni kekuasaan. Dakwah kultural seyogyanya menekankan substansi ajaran Islam seperti yang dilakukan Rasulullah ketika berdakwah di Makkah. Ketika itu beliau menghadapi berbagai model kebudayaan, paham keberagaman, dan corak sosial. Maka yang dikedepankan Nabi adalah mendakwahkan nilai-nilai Islam substantif, seperti kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kerja sama, dan semangat melawan penindasan.²²

Dakwah Muhammadiyah juga dikesankan bersifat elitis karena hanya mampu menjangkau kalangan tertentu dalam masyarakat. Selama ini dakwah Muhammadiyah hanya cocok untuk masyarakat terdidik, terutama yang ada di perkotaan dan kelompok-kelompok urban. Berkaitan dengan problem inilah, pendekatan kultural diperlukan agar dakwah Muhammadiyah memiliki efek sosial dengan jangkauan yang lebih luas. Menurut Din Syamsuddin (lahir 1958), dakwah kultural dapat dijadikan sebagai salah satu kaca mata baru dalam melihat multiaspek dari keberagaman tradisi lokal agar dakwah dapat dijadikan salah satu media transformasi sosial.²³

Strategi dan pendekatan dakwah kultural yang dicanangkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah diharapkan dapat menumbuhkan rasa berempati dari para mubaligh agar bersifat akomodatif dan menjadikan budaya lokal sebagai sarana berdakwah. Hal ini perlu dilakukan karena seperti telah dikemukakan bahwa manusia adalah makhluk yang bersifat *homo religius* dan *homo festivus*. Manusia telah menggunakan simbol-simbol tertentu dalam mempraktikkan ajaran agamanya. Hampir setiap agama dan paham keagamaan telah mengekspresikan praktik keagamaannya dalam banyak perayaan agama (festival) dan ritus. Sebagai contoh, dalam ritual ibadah haji, umat Islam di banyak daerah telah melakukan kreasi yang sangat beragam baik pada saat menjelang maupun sesudah pelaksanaan ibadah ini dilakukan. Dalam perayaan hari-hari besar Islam, seperti *mawlid*, *isra* dan *mi'raj* dan tahun baru hijriah, juga sering dijumpai kreasi yang turut menghiasi ritual keagamaan.

²¹Ahmad Fuad Fanani, "Membendung Arus Formalisme Muhammadiyah," dalam Moeslim Abdurrahman (ed), *Muhammadiyah sebagai*, 15.

²²Ibid., 26-27.

²³M. Din Syamsuddin, "Menjadikan Dakwah sebagai Strategi Transformasi Sosial," dalam Imam Mukhlas, *Landasan Dakwah Kultural: Membaca Respon al-Qur'an terhadap Adat Kebiasaan Arab Jahiliyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), vi.

Kreasi dan inovasi untuk merayakan hari besar Islam tersebut dapat dinamakan budaya agama karena memang tidak ditemukan dasar normatifnya dalam ajaran agama. Perayaan hari besar yang secara resmi diajarkan dalam Islam hanya ada dua, yaitu 'Idul Fitri dan 'Idul Adlha. Maka, di luar dua hari raya ini merupakan pengayaan kehidupan keagamaan. Dalam merespon berbagai tradisi keberagaman yang berkembang di masyarakat, dakwah Muhammadiyah tidak dibenarkan untuk bersikap antipati. Warga Muhammadiyah harus menyontoh kreasi dan inovasi Ahmad Dahlan yang telah menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah. Hanya dengan bersikap akomodatif dan disertai ketegasan terhadap budaya, Muhammadiyah akan berkembang pesat.

Karena itulah pendekatan kultural harus berusaha memperhatikan tiga dimensi dakwah, yaitu kerisalahan, kerahmatan, dan kesejarahan. Dimensi kerisalahan dipahami sebagai upaya meneruskan tugas Rasulullah untuk menyeru agar umat mengetahui, memahami, menghayati, mengimani, dan mengamalkan Islam sebagai pandangan hidup. Sedang dimensi kerahmatan bermakna untuk mengaktualkan Islam sebagai rahmat (jalan hidup yang menggembirakan, memudahkan, dan menyejahterakan) umat manusia. Adapun dimensi kesejarahan dimaksudkan untuk mengaktualkan peran kesejarahan manusia beriman dalam memahami dan mengambil pelajaran masa lalu untuk kepentingan mempersiapkan masa depan.²⁴

Secara substansial, misi dakwah kultural adalah upaya untuk melakukan dinamisasi dan purifikasi. Dinamisasi merupakan cerminan kreasi budaya yang berkecenderungan selalu berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik dan islami. Sedangkan purifikasi berarti usaha pemurnian nilai-nilai dalam budaya dengan mencerminkan nilai-nilai tauhid.²⁵ Dakwah Islamiyah pasti membutuhkan budaya dalam rangka menyebarluaskan ajarannya. Tetapi, harus tetap ada perbedaan yang tegas antara Islam sebagai wahyu yang memiliki dimensi universal, absolut, dan abadi, dengan Islam sebagai manifestasi sosial budaya yang bersifat partikular, relatif, dan temporer.

Implementasi gagasan dakwah kultural Muhammadiyah ternyata tidak mudah. Meski misi dakwah kultural berupaya untuk menyeimbangkan prinsip dinamisasi dan purifikasi, tetapi tekanan utama dakwah Muhammadiyah pada aspek purifikasi tampak lebih dominan. Menurut Moeslim Abdurrahman, fenomena ini terjadi karena gerakan-gerakan Islam yang menampilkan wajah sebagai gerakan purifikasi, seperti halnya Muhammadiyah, selalu meletakkan ortodoksi sebagai ciri utama. Dikatakan oleh Moeslim Abdurrahman, meski berpaham teologi praksis, tetapi hal itu tidak berarti bahwa Muhammadiyah berorientasi transformatif dalam arti memperjuangkan cita-cita emansipatoris secara sosial dan memihak pada yang tertindas. Keberpihakan Muhammadiyah pada kaum *du'afa* lebih dikarenakan ajaran yang bersifat normatif-ortodoks ketimbang ideologis-emansipatif.²⁶ Pernyataan Moeslim Abdurrahman ini seakan ingin menjelaskan bahwa sikap sosial dan kultural Muhammadiyah selama ini disandarkan pada orientasi dan cita-cita ortodoksi tersebut.

Karena itu, Moeslim Abdurrahman menyatakan bahwa seharusnya dakwah kultural Muhammadiyah dimaknai sebagai proses "humanisasi" sosial dan "apresiasi" terhadap budaya sebagai bentuk kreatifitas masyarakat. Maka, dalam konteks inilah orientasi dan cita-cita

²⁴Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dakwah Kultural*, 23.

²⁵*Ibid.*, 30-31.

²⁶Moeslim Abdurrahman, *Islam sebagai Kritik Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2003), 153.

otodoksi dapat menjadi hambatan bagi Muhammadiyah dalam mengimplementasikan gagasan dakwah kultural. Moeslim Abdurrahman kemudian memberikan contoh budaya “slametan” dan “reog”. Dikatakannya, “meskipun *slametan* dan *reog* sudah diislamkan, namun karena produk budaya seperti ini tidak memiliki referensi ke-Islam-an yang otentik, maka orang-orang Muhammadiyah tetap memandangnya sebagai tindakan *bid’ah* kultural yang sulit diterima.”²⁷

Orientasi dan cita-cita ortodoksi Muhammadiyah sangat tampak dalam misi utama gerakan, *al-ruju>ila>al-Qur’an wa al-Sunnah*. Misi suci ini menurut Zakiyuddin Baidhawiy (lahir 1972) telah menyebabkan Muhammadiyah terbebani tanggung jawab untuk mempertahankan “Islam murni.” Dengan basis Islam murni ini pula sebagian kelompok di Muhammadiyah menuduh dan mendiskreditkan “Muslim lain”, atau bahkan “Muhammadiyah lain” yang tidak sepaham. Maka, dikembangkan pandangan bahwa paham keagamaan mereka ini telah dimasuki unsur TBC dan karena itu dianggap sesat.²⁸ Corak Islam murni senantiasa berupaya menarik garis pembatas antara “kita” dan “mereka”, atau dengan terminologi lain *minna* dan *minhum*. Terminologi kita (*minna*) adalah representasi kelompok kanan, yaitu kelompok dengan klaim kebenaran absolut. Sementara mereka (*minhum*) adalah kelompok sempalan, sesat, dan ahli *bid’ah*. Termasuk kelompok *minhum* ini adalah Muslim nominal atau kaum abangan.

Fenomena budaya “abangan” dalam perspektif dakwah selalu dipersepsi sebagai wajah ke-Islam-an yang belum sempurna sehingga harus disempurnakan. Dalam kaitan ini, strategi dakwah kultural mengajarkan agar para mubaligh tidak memusuhi dan menjauhi budaya tersebut. Yang harus dilakukan adalah mereka harus mendekati, merangkul, dan mengajak agar menjadi Muslim yang baik dan benar. Tetapi, asumsi teologis ini menurut Moeslim Abdurrahman dapat menjadi titik lemah. Sebab, asumsi teologis ini terlahir dari kesadaran aqidah dan iman yang “binaris”; bahwa ada bentuk ke-Islam-an yang belum selesai dan ada yang secara normatif telah ketemu wujudnya yang otentik.

Karena itulah, Moeslim Abdurrahman menganjurkan agar Muhammadiyah memiliki ketegasan sikap teologis yang menunjukkan kesadaran untuk mengakui dan menghormati seni dan budaya sebagai kekayaan peradaban. Sikap ini diperlukan agar agenda dakwah kultural tidak dibebani kepentingan dakwah yang mengajak “mereka” menjadi seperti “kita” dengan standar Muhammadiyah.²⁹ Dengan cara ini, seni tetap akan menjadi seni selama tidak mempertontonkan hal-hal yang menyebabkan degradasi moral.

Merespon beberapa kritik tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerbitkan panduan dakwah dengan pendekatan kultural. Di dalam panduan ini dikemukakan konsep dakwah kultural, keterkaitannya dengan budaya lokal, dakwah kultural di era global, dakwah kultural melalui apresiasi seni, dan dakwah kultural melalui multimedia. Bahkan juga dikemukakan kesinambungan dakwah kultural dengan program gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Pada poin ini, dakwah kultural dikatakan merupakan kelanjutan dari program gerakan jamaah dan dakwah jamaah, keluarga sakinah, dan *qaryah ṭayyibah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dakwah kultural dapat dijadikan payung besar yang mewadahi konsep-

²⁷Ibid.

²⁸Zakiyuddin Baidhawiy, “Dakwah Kultural vs Supremasi Islam Murni,” dalam Moeslim Abdurrahman (ed), *Muhammadiyah sebagai*, 79.

²⁹Ibid., 156.

konsep dakwah yang sudah ada sebelumnya dengan melakukan perluasan pada ruang lingkup, pendekatan, dan metode.³⁰ Melalui dakwah kultural ini diharapkan dakwah Muhammadiyah lebih kreatif dan inovatif sehingga dapat mempercepat program pemberdayaan menuju masyarakat madani. Yang juga penting adalah agar Muhammadiyah lebih ramah dengan berbagai model keberagaman dan tradisi lokal.

Penutup

Dakwah kultural Muhammadiyah, seperti pernah dikatakan Ahmad Syafii Maarif, dimaksudkan agar dakwah Muhammadiyah lebih lentur dan fleksibel. Ini berarti bahwa Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah mengakomodasi budaya lokal, hanya saja pada tingkat tertentu dirasakan masih kurang. Apalagi dalam perkembangannya Muhammadiyah juga kurang memiliki media berdakwah untuk mengembangkan strategi dakwah kultural, khususnya yang berkaitan dengan seni dan budaya. Karena itulah Muhammadiyah terus melakukan pembinaan pada para mubaligh dengan memberikan wawasan agar mampu melihat budaya lokal dari sisi dalam (*from within*), bukan dari aspek luarnya. Dengan perspektif ini maka tidak tertutup kemungkinan bermunculan mubaligh Muhammadiyah yang lebih menekankan pentingnya kearifan lokal (*local wisdom*). Bahkan perspektif dari dalam ini pada saatnya akan mengubah pola pikir mubaligh Muhammadiyah sehingga merasa tidak ada halangan psikologis untuk menjadikan budaya sebagai media dalam berdakwah.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, Moeslim. "Berislam Secara Kultural," dalam *Muhammadiyah sebagai Tenda Kultural*, ed. Moeslim Abdurrahman. Jakarta: Ideo Press dan Maarif Institute, 2003.
- . *Islam sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Ali, A. Mukti. "Amalan Kyai Haji Ahmad Dahlan," dalam *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan: Sebuah Dialog Intelektual*, ed. Sujarwanto, dkk. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. "Dakwah Kultural vs Supremasi Islam Murni," dalam Moeslim Abdurrahman. *Muhammadiyah sebagai Tenda Kultural*. Jakarta: Ideo Press dan Maarif Institute, 2003.
- Fanani, Ahmad Fuad. "Membendung Arus Formalisme Muhammadiyah," dalam Moeslim Abdurrahman (ed). *Muhammadiyah sebagai Tenda Kultural*. Jakarta: Ideo Press dan Maarif Institute, 2003.
- Fariz. "Islam Bukan Agama Misionaris tapi Agama Peradaban," *Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, vol. 1, no. 1 (Juni, 2003).
- Ghozali, Abd. Rohim. "Dari Dogmatisme ke Kultural," dalam Moeslim Abdurrahman (ed). *Muhammadiyah sebagai Tenda Kultural*. Jakarta: Ideo Press dan Maarif Institute, 2003.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan, 2001.
- Majelis Tarjih Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tanya Jawab Agama*, Jilid II. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001.

³⁰Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dakwah Kultural*, 106.

- Mughni, Syafiq A. dkk. *Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004*. Surabaya: Hikmah Press, 2005.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Benteng, 2005.
- . "Pendidikan Bagi Semua," *Suara Muhammadiyah*, no. 16, th. 93 (16-31 Agustus 2008).
- . *Kesalahan Multikultural: Ber-Islam secara Autentik-Kontekstual di Aras Peradaban Global*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2005.
- Nashir, Haedar dkk. *Materi Induk Pengkaderan Muhammadiyah*. Yogyakarta: BPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1994.
- Pasha, Mustafa Kamal dan Chusnan Yusuf. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islamiyah*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2000.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. Malang: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2001.
- . *Dakwah Kultural Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- . *Berita Resmi Muhammadiyah*, No. 4 (Rajab 1424 H/ September 2003).
- Simuh. "Muhammadiyah dan Pembinaan Masyarakat yang Berbudaya Madani," dalam *Muhammadiyah dalam Kritik*, ed. Maryadi dan Abdullah Aly. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Syamsuddin, M. Din. "Menjadikan Dakwah sebagai Strategi Transformasi Sosial," dalam Imam Mukhlas. *Landasan Dakwah Kultural: Membaca Respon al-Qur'an terhadap Adat Kebiasaan Arab Jahiliyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- Taylor, Edward B. "Culture," dalam David L. Shills (ed.). *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 3. New York: The Macmillan Company and the Free Press, 1996.